



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

*Analysis of Factors Affecting Human Development Index in the ex Karesidenan
Besuki*

SKRIPSI

Oleh:
VICKY KRESNO KUNCORO
NIM:120810101150

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

*Analysis of Factors Affecting Human Development Index in the ex Karesidenan
Besuki*

SKRIPSI

Disusun Guna Sebagai Persyaratan Tugas Akhir Mahasiswa dan Sebagai Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
VICKY KRESNO KUNCORO
NIM:120810101150

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Anifatul Hanim dan Ayahanda Sudaryanto yang tercinta;
2. Adik-adiku yang kusayangi Ivana Rosediana Dewi dan Intan Larasati Anisa Rahma
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

MOTTO

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “ “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” (QS. Al-Isra’: 7).

“Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu”
(Ali bin Abu Thalib)

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan (Nabi Muhammad SAW)”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Kresno Kuncoro

NIM : 120810101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

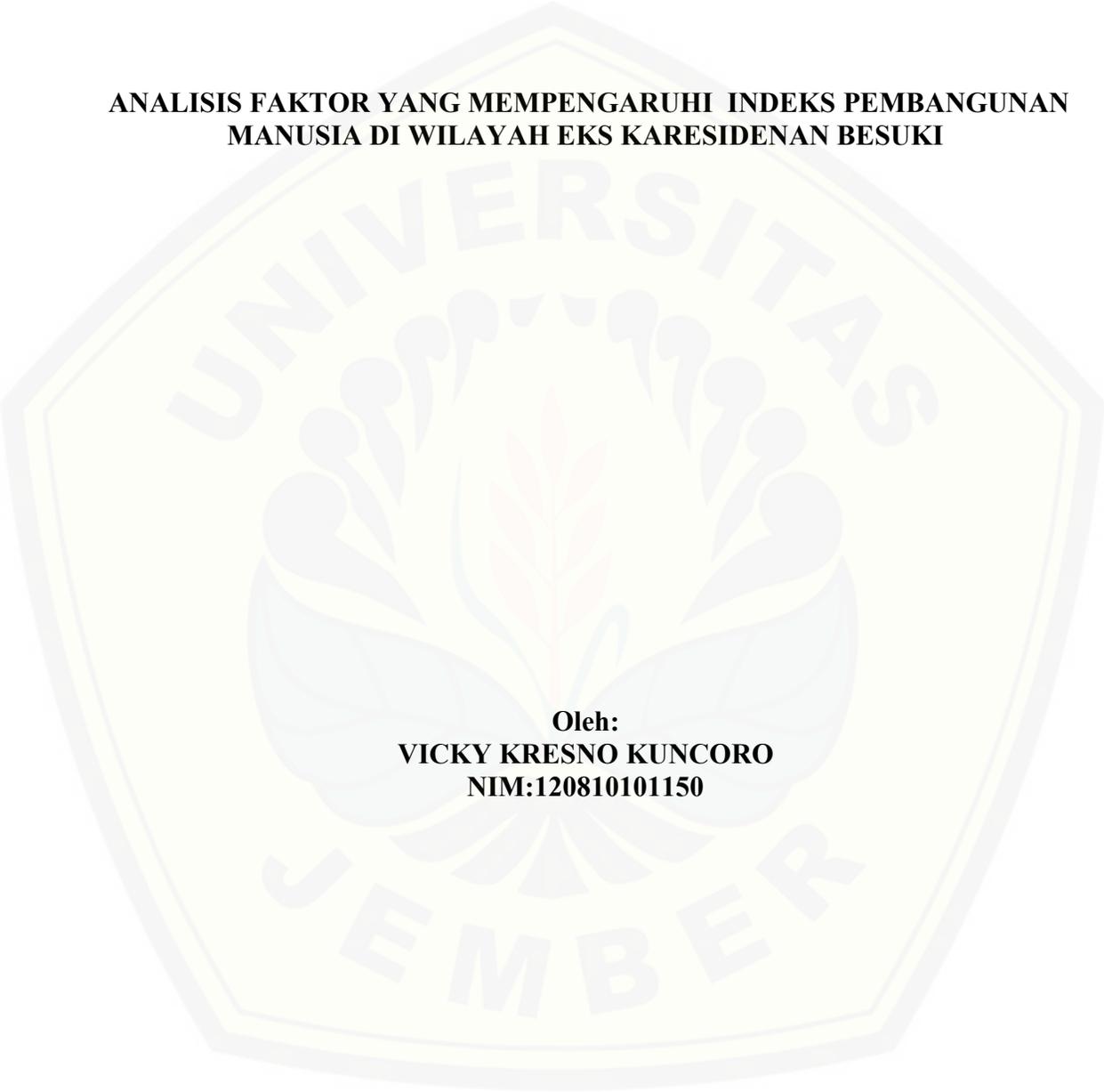
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2016
Yang menyatakan,

Vicky Kresno Kuncoro
NIM: 120810101150

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**



Oleh:
VICKY KRESNO KUNCORO
NIM:120810101150

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Aisah Jumiati, SE,. M.P

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks
Pembangunan Manusia Di Wilayah Eks Karesidenan
Besuki”
Nama Mahasiswa : Vicky Kresno Kuncoro
NIM : 120810101150
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 10 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani. M.si

NIP: 196101211987022002

Aisah Jumiati, SE ,MP

NIP: 196809261994032002

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP: 19641108 198902 2 0001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Vicky Kresno Kuncoro

NIM : 120810101150

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal:

28 Oktober 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. P. Edi Suswandi M.P. (.....)
NIP: 195504251985031001

2. Sekretaris : Dr Lilis Yuliati S.E.M.si (.....)
NIP: 196907181995122001

3. Anggota : Dr Rafael Purnomo S, S.E,M.Si (.....)
NIP: 195810241988031001

Mengetahui/Menyetujui
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad,SE,M.M. Ak.CA
NIP: 197107271995121001

Vicky Kresno Kuncoro

Jurusan Ilmu Ekonomi ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Jember

ABSTRAK

Paradigma yang berkembang pada saat ini adalah pembangunan manusia dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai taraf hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh variable anggaran belanja pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2006 -2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen. Hal ini disebabkan karena Belanja pemerintah sektor pendidikan yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Akan tetapi butuh waktu dan proses untuk bisa menikmati hasil dari invesatsi tersebut. Variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan , Indeks Pembangunan Manusia

Vicky Kresno Kuncoro

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

Recent paradigm development at this time is that human of quality human resources which is measured by the Human Development Index. There are two sectors that need to be considered by the government in efforts to expand the opportunities of its citizens to achieve a standard lifeable, namely education and health. The aim of this study was to determine the effect of variable government budget sector of education and health of the human development index, in the region of Ex Besuki residency in 2006 - 2013. The results showed that government expenditure variable positively influence the education sector and not significant to the IPM on the value of α by 5 percent. This is because government spending for the education sector is essentially an investment in human capital, is a much longer-term investment, so the result is not immediately be felt today. But it takes time and the process to be able to enjoy the results of the invesatsi. Variable government spending affect positively the health sector and significant impact on HDI at α value by 5 percent. This suggests that the increased level of health will boost the quality of human resources, improving labor productivity, which in turn will create economic improvement of society.

Key words: government spending for education and health sector , *Human Develoment Index*

RINGKASAN

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki; Vicky Kresno Kuncoro; 120810101150; 2016; 117 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Paradigma yang berkembang bahwa pembangunan ekonomi pada saat ini diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia di setiap negara.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin cukup besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar tetapi juga masih terjadi peningkatan pada rasio Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Eks Karesidenan Besuki meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Setiap kabupaten atau kota dalam otonomi daerah memiliki kemampuan mengelola anggarannya dalam kegiatan pembangunan termasuk di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Anggaran tersebut salah satunya adalah belanja modal yang memiliki tujuan untuk menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan PDRB pada daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat yaitu apabila

masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, kesehatan yang terjamin dan daya beli masyarakat yang tinggi pula yang diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Eks Karesidenan Besuki yang meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Objek penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh variable pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 sampai 2013. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi dengan menggunakan data panel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan adalah sebesar $3.85E-18$. Hal ini disebabkan karena Belanja pemerintah sektor pendidikan yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Akan tetapi butuh waktu dan proses untuk bisa menikmati hasil dari invesatsi tersebut. Variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan adalah sebesar $2.46E-14$. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki** ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Nanik Istiyani, M.Si dan Aisyah Jumiati, SE, MP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M. Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember;
3. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Ibunda Anifatul Hanim dan Ayahanda Sudaryanto yang telah membimbing dari kecil dan sekarang hingga dewasa;
6. Adik saya tercinta Ivana Rose Diana Dewi dan Intan Larasati Anisah Rahmah
7. Almamater

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan | 5 |
| 1.4 Manfaat | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Landasan Teori | 6 |
| 2.1.1 Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia | 6 |

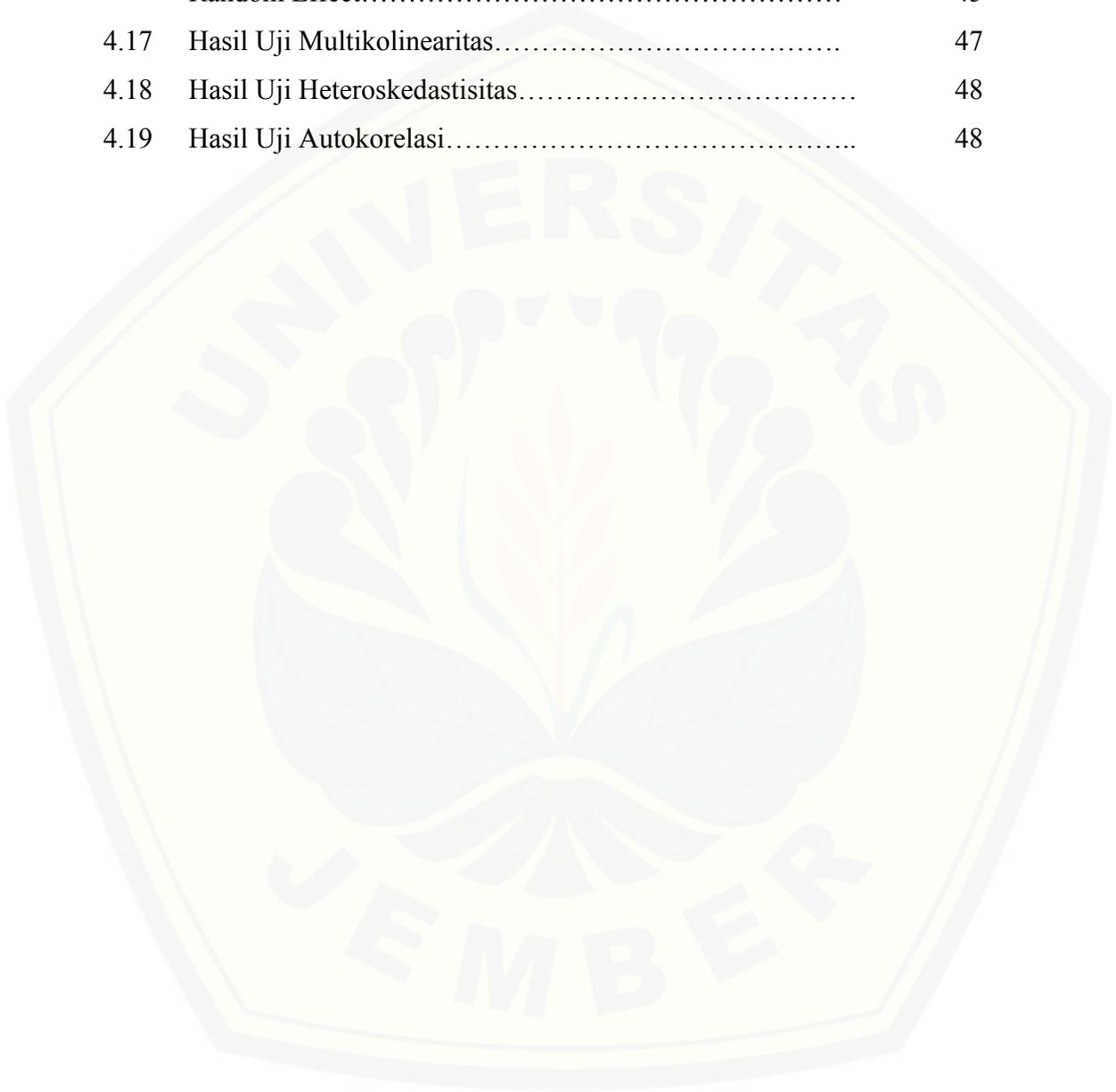
| | |
|--|-----------|
| 2.1.2 Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap .. Pembangunan..... | 8 |
| 2.1.3 Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia..... | 9 |
| 2.1.4 Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.. | 13 |
| 2.1.5 Hubungan antara Pengeluaran Publik dan Pembangunan Manusia..... | 15 |
| 2.1.6 Peranan Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi..... | 16 |
| 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya | 20 |
| 2.3 Kerangka konseptual | 21 |
| 2.4 Hipotesis | 22 |
| BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 23 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian | 23 |
| 3.1.2 Unit Analisis Dan Ruang Lingkup | 23 |
| 3.1.3 Jenis Sumber Data | 23 |
| 3.2 Metode Analisis Data | 24 |
| 3.2.1 Analisis Deskriptif | 24 |
| 3.2.2 Analisis Data Panel | 24 |
| 3.2.3 Regresi Linier Berganda..... | 25 |
| 3.2.4 Uji Statistik..... | 26 |
| 3.2.5 Uji Asumsi Klasik..... | 29 |
| 3.3 Definisi Operasional | 31 |
| BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1 Gambaran Umum | 33 |
| 4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Eks Karesidenan Besuki | 33 |
| 4.1.2 Keadaan Perekonomian Wilayah Eks Karesidenan Besuki | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.3 Keadaan Penduduk Wilayah Eks Karesidenan | |
| Besuki | 41 |
| 4.1.4 Realisasi Belanja Modal Wilayah Eks Karesidenan | |
| Besuki | 41 |
| 4.1.5 Hasil Analisa Skalogram Diwilayah Karesidenan | |
| Besuki..... | 49 |
| 4.1.6 Hasil Analisis Shift Share di Wilayah Karesidenan Besuki | 50 |
| 4.2 Analisis Data | 52 |
| 4.2.1 Pengujian Model Data Panel..... | 52 |
| 4.2.2 Analisis Regresi Data Panel..... | 53 |
| 4.2.3 Uji Statistik | 55 |
| 4.2.4 Uji Asumsi Klasik | 56 |
| 4.3 Pembahasan | 60 |
| 4.3.1 Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. | 60 |
| 4.3.2 Pengaruh Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia... | 62 |
| BAB 5. PENUTUP | 65 |
| 5.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.2 Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya..... | 17 |
| 4.1 PDRB Kabupaten Jember Tahun 2004 – 2013..... | 29 |
| 4.2 PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 – 2013..... | 30 |
| 4.3 PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 – 2013..... | 31 |
| 4.4 PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2004 – 2013..... | 32 |
| 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2004 – 2013 | 34 |
| 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 – 2013 | 35 |
| 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 – 2013..... | 37 |
| 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2004 – 2013..... | 38 |
| 4.9 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 39 |
| 4.10 Anggaran Belanja Pemerintah dibidang Pendidikan di Wilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 40 |
| 4.11 Anggaran Belanja Pemerintah dibidang Kesehatan di Wilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 40 |
| 4.12 Hasil Analisis Skalogram di Wilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 41 |
| 4.13 Hasil Analisis Shift Share di Wilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 42 |
| 4.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia diwilayah Eks Karesidenan Besuki..... | 43 |

| | | |
|------|---|----|
| 4.15 | Hasil Uji Hausman Test..... | 44 |
| 4.16 | Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Random Effect..... | 45 |
| 4.17 | Hasil Uji Multikolinearitas..... | 47 |
| 4.18 | Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 48 |
| 4.19 | Hasil Uji Autokorelasi..... | 48 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner..... | 7 |
| 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2004 – 2013..... | 30 |
| 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 – 2013..... | 31 |
| 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 – 2013..... | 32 |
| 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2004 – 2013..... | 33 |
| 4.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2004 – 2013..... | 35 |
| 4.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 – 2013..... | 36 |
| 4.7 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2004 – 2013..... | 37 |
| 4.8 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2004 – 2013..... | 38 |
| 4.9 Hasil Uji Normalitas..... | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| A. Data Penelitian | 57 |
| B. Uji Hausman Tes..... | 58 |
| C. Hasil Regresi Berganda pada Data Panel dengan Menggunakan Random Effect..... | 59 |
| D. Uji Asumsi Klasik | 60 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan yaitu meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat diwujudkan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur., (Suparmoko, 1979, 264-265).

Sesuai dengan amanat Nasional, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Melalui peningkatan indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Kendala pembangunan yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi masyarakat yang beragam. dimensi pendidikan dalam IPM diukur dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. dimensi kesehatan dalam IPM diukur dengan indikator angka harapan hidup dan dimensi ekonomi diukur dengan indikator pengeluaran perkapita (TAP MPR NO 1 TAHUN 2003)

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembanguana. Kemajuan suatu Negara tidak hanya dapat dilihat dari besarnya angka pendapatan domestik bruto saja tetapi mencakup aspek harapan hidup serta masyarakat dan pendidikannya. Beberapa faktor penting dalam pembangunan yang

sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. (Mahmudi, 2007).

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. (Brata,dkk, 2004)

Menurut Samuelson (2005) ada empat faktor sumber pembangunan yaitu: 1).Sumber daya manusia, 2) Sumber daya alam, 3) pembentukan modal, 4). Teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di bidang sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana pada umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya.

Menurut Teori Keynes, Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi Serta dapat mengurangi kesenjangan pembangunan Fungsi pemerintah dalam perekonomian adalah fungsi alokatif, distributif, stabilitif. Dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Menurut Mankiw (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara b menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. . Modal manusia dapat mengacu pada kualitas dan kuantitas pendidikan, dan kesehatan. . Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang ber- kelanjutan (Todaro, 2006)

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan PDRB besar bukan berarti tidak mempunyai permasalahan di dalam wilayahnya. Ada beberapa wilayah di Jawa Timur yang sampai saat ini masih dianggap sebagai wilayah tertinggal. Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa terdapat 183 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. Provinsi Jawa Timur memiliki empat kabupaten yang masuk dalam klasifikasi wilayah tertinggal meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Pamekasan, Bangkalan. (Tarigan, 2010).

Wilayah Eks Karesidenan Besuki merupakan suatu wilayah yang terdapat di Jawa Timur bagian timur. Wilayah ini terdiri dari empat kabupaten diantaranya Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso. Dua diantaranya menjadi wilayah tertinggal yaitu Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Penentuan pusat pertumbuhan di Eks Karesidenan Besuki diharapkan dapat menjadi pemicu berkembangnya wilayah tersebut, terutama dalam pembangunan wilayah tertinggal yang meliputi Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat menjadi konsentrasi kegiatan dan merangsang wilayah lainya untuk terus berkembang.

Beberapa Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Jember muncul sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Eks. Karesidenan Besuki karena memiliki jumlah fasilitas terbesar. Sektor pertanian menjadi sektor yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif tertinggi diantara sektor lain di keempat Kabupaten yang masuk wilayah Eks. Karesidenan Besuki. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa tahun 2013 pendapatan perkapita Kabupaten Jember adalah 15 juta/tahun pertahun, Kabupaten Situbondo 20 / juta pertahun dan Kabupaten Banyuwangi 25,5 juta/tahun pertahun.

Kabupaten Banyuwangi memiliki pendapatyan perkapita yang lebih tinggi karena salah satunya investasi yang masuk di Banyuwangi juga tinggi. Kabupaten Situbondo juga lebih unggul karena memiliki potensi alam dengan daerah pesisir Pantai Utaranya yang panjang dan mendatangkan nilai investasi serta dapat mensejahterakan masyarakat Situbondo. Jika dilihat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Banyuwangi mempunyai nilai IPM tertinggi yaitu sebesar 71.02. Selanjutnya Kabupaten Jember dengan nilai IPM sebesar 66.6; Situbondo 65,73 dan Bondowoso 65,39, BPS, 2014

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan konsep teori tersebut diatas ,dirumuskan suatu masalah

1. Seberapa besar anggaran belanja pemerintah disektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia,di wilayah Eks Karesidenan Besuki
2. Seberapa besar anggaran belanja pemerintah disektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, di wilayah Eks Karesidenan Besuki

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable anggaran belanja pemerintah disektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia, di wilayah Eks Karesidenan Besuki
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable anggaran belanja pemerintah disektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia, di wilayah Eks Karesidenan Besuki

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang ilmu ekonomi.
2. Sebagai informasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam *Human Development Report* (UNESCO, 2007) dijelaskan bahwa *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep tiga dimensi dasar dari proses pengembangan kualitas manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah: (1) manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (*life expectancy at birth*); (2) manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (*adult literacy rate*) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan; (3) Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator *purchasing power parity* (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika. (Bappenas, 2004)

Mengutip isi *Human Development Report*(HDR) pertama tahun 1990 pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat untuk berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. untuk mengukur kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka indikator angka melek dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak. Adapun komponen IPM yaitu:

1. harapan hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

3. Rata-rata lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal

4. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto (PDB) riil yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. (Bappenas, 2004)

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto (PDB) riil yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson

2.1.2 Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan

Menurut Mangkoesobroto (1997) menjelaskan bahwa peranan negara dalam pembangunan perekonomian sangat beragam dan secara garis besar dibedakan atas dua pembahasan yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah secara mikro

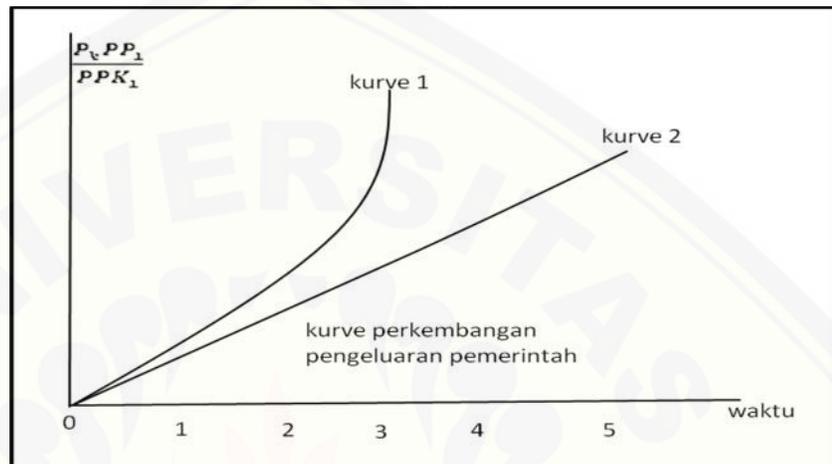
Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Secara mikro, teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai barang publik. Besarnya permintaan akan barang publik akan menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang public,
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
3. Perubahan kualitas barang public
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi

2. Pengeluaran pemerintah secara makro

Teori Musgrave menjelaskan bahwa Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Sedangkan Teori Wagner menjelaskan bahwa jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang

menganggap pemerintah sebagai individu. Hukum Wagner yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial ditunjukkan oleh kurva 1. (Mangkoesobroto, 1997)



Gambar 2.1. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner (Sumber : Guritno Mangkoesobroto, 1997: h.172

2.1.3. Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi.

Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan suatu

bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran. (Hastarini, 2005)

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Menurut Suparno, 2014 implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian Ilyas (2014) menunjukkan bahwa meningkatnya belanja pemerintah sektor pendidikan terbukti mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan yakni pemerintah harus tetap mempertahankan pengalokasian anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun untuk

sektor pendidikan dan kesehatan untuk tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan alokasi belanja sektor pendidikan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang besar untuk sektor pendidikan dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dengan baik. Dengan adanya program pendidikan gratis yang diterapkan oleh Pemerintah, maka semua masyarakat memiliki akses terhadap layanan pendidikan.

Semakin banyaknya masyarakat yang mampu menikmati layanan pendidikan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan masyarakat. Bila hal tersebut meningkat, akan mendorong produktivitas tenaga kerja. Belanja pemerintah yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Akan tetapi butuh waktu dan proses untuk bisa menikmati hasil dari investasi tersebut.

Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran. (Hastarini,2005)

Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sector pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan

pendidikan yang menunjang dan memadai. peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan karena karakteristik yang ada pada sektor yaitu sebagai berikut: 1. pengeluaran pendidikan sebagai investasi 2. Eksternalitas. 3. pengeluaran di bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan public. 4. Rate of return pendidikan komponen-komponen pendidikan yaitu:

1. Bersekolah: mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal yaitu SD/ sederajat dan SMP sederajat dan pendidikan menengah yaitu SMA sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT sederajat maupun non formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), instansi lainnya negeri maupun swasta.
2. Pendidikan formal: jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi meliputi SD/MI/ sederajat SMP/MTS /sederajat SMA/MA/ sederajat dan PT.
3. Pendidikan non formal: jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
4. Tidak/ belum pernah sekolah: tidak/ belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan termasuk mereka yang tamat/ belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
5. Tamat sekolah: telah menyelesaikan pelajaran pada kelas terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ ijazah. seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

6. Angka buta huruf:proporsi penduduk usia tertentu yangb tidak dapat membaca dan menulis huruf latin terhadap penduduk usia tertentu.
7. Angka partisipasi sekolah (APS):proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
8. Angka partisipasi murni (APM):proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.
9. Angka partisipasi kasar (APK):proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
10. Jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan:jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang ditandai oleh sertifikat/ijazah
11. SD meliputi:Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyahdan sederajat.
12. SMP meliputi:SMP umum<Madrasah Tsanawiyah,SMP kejuruan dan sederajat.
13. SMA meliputi:jenjang pendidikan menengah atas (SMA),sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah sederajat
14. PT meliputi:jenjang pendidikan DIPLOMA I,II,III, IV dan sederajat

2.1.4 Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan, 2006).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana

kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Hasil penelitian Ilyas (2014) menunjukkan bahwa Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).

Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Investasi Pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumberdaya manusia yang handal dan sehat akan semakin bertambah.

Meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kondisi ekonomi serta kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin pula pada meningkatnya angka harapan hidup berarti pula akan mendorong peningkatan IPM karena hal tersebut merupakan komposit pembentuk IPM. (Ilyas, 2014)

Belanja kesehatan adalah belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat 2 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 % dari APBD di luar gaji. Konsekuensi pemerintah akan hal ini menunjukkan akumulasi pengeluaran pemerintah pada belanja kesehatan merupakan investasi sekaligus campur tangan pemerintah dalam mewujudkan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia

2.1.5 Hubungan antara Pengeluaran Publik dan Pembangunan Manusia

Masalah kemiskinan yang identik dengan jumlah pendapatan masyarakat yang tidak memadai. Agenda mengatasi kemiskinan bagi suatu negara berkaitan dengan banyaknya faktor yang berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri, karena dampak dari kemiskinan itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan.

Menurut *Center for the Study of Living Standards* (2001) dalam Toyamah, dkk (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan kesempatan

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

Brata (2005) menyebutkan bahwa pembangunan manusia yang di-proxi dari IPM (*Human Development Index*) memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan, yaitu dimensi yang terkait dengan (a) aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), (b) upaya untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan (c) akses sumber daya yang mampu memenuhi standar hidup. Ke tiga dimensi ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tingkat kemiskinan.

2.1.6. Peranan Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2008). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Infrastruktur akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Beberapa teori yang menjelaskan tentang pentingnya penanaman modal dalam pembangunan yaitu:

A. Adam Smith

Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis (Sukirno,2008). Menurut Adam Smith ada dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia, dan stok barang kapital yang ada. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi (Sukirno,1985).

Teori ini menjelaskan bahwa akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultandan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi penanam modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat. Namun pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada (Kuncoro,1997). Adam Smith juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Wealthn of Nation* pada tahun 1776 menjelaskan bahwa adanya penekanan harga yang fleksibel baik secara upah maupun barang.

Adam Smith juga menjelaskan bahwa faktor yang menentukan pembangunan adalah perkembangan penduduk. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan meningkatkan proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

B. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 2001). Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

$$Y = AK$$

Persamaan tersebut A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam persamaan ini ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro, 2000:122). Kenyataannya dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Dan akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

C. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Menurut teori pertumbuhan neo klasik tradisional pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih 3 faktor yakni kenaikan fasilitas dan kuantitas tenaga kerja penambahan modal dan penyerapan teknologi(Todaro dan Smith2008)

Mankiw, *at all* (2006) melakukan modifikasi terhadap model pertumbuhan neo klasik dimana mereka mengusulkan pemakaian variable akumulasi modal manusia(human capital).sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian berasal dari pertumbuhan capital,tenaga kerja dan modal manusia.Hasil estimasi yang dilakukan oleh model MRW ternyata lebih baik dibandingkan model klasik.

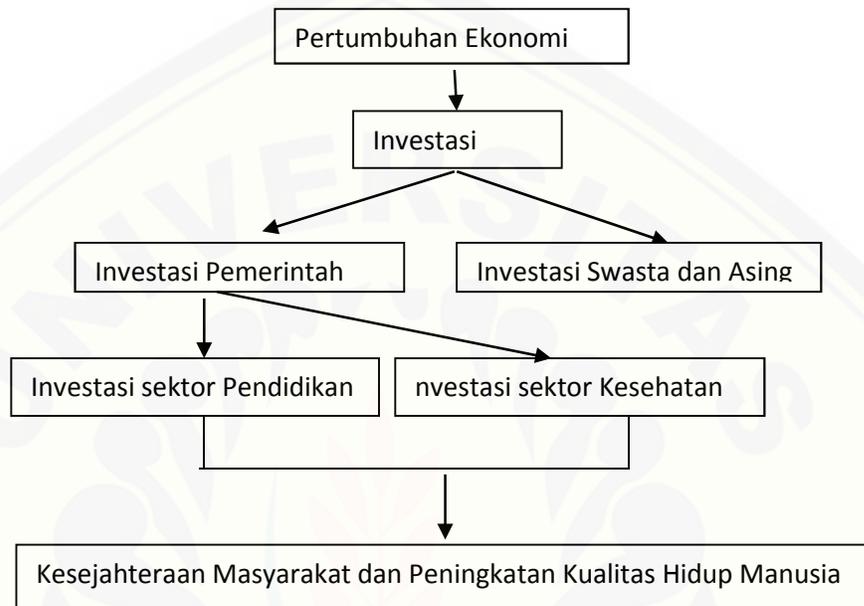
Pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi.kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen. Pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan.peran modal lebih besar dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya fisik saja tapi menyangkut modal manusia.akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi(Mankiw 2006)

Pertumbuhan ekonomi memperluas dan memperbesar pemenuhan materi untuk kebutuhan manusia sejauh mana kebutuhan tersebut terpenuhi tergantung dengan alokasi sumber daya distribusi ekonomi dan peluang kerja dalam perekonomian.pertumbuhan dan pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan 2 arah yang meskipun tidak berhubungan secara otomatis namun diperkuat dngan kebijakan yang tepat dari pemerintah.ketika pertumbuhan dan IPM mempunyai hubungan yang sangat kuat mereka saling berkontribusi satu sama lain tetapi ketika hubungan tersebut lemah mereka akan merusak lainnya.Unbalanced link adalah kondisi dimana pertrumbuhan ekonomi tinggi namun kualitas hidup rendah atau sebaliknya meningkatnya kualitas hidup namun pertumbuhan ekonomi rendah hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dipengaruhi oleh rantai utama adalah kegiatan dan pengeluaran rumah tangga(household activities and expenditure)serta pengeluaran pemerintah (government policy and expenditure)

Tabel 2.2. Tinjauan penelitian Sebelumnya

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|-------------------------------|--|---|---|
| Septiana M, dkk | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan di Sulawesi Utara | Metode analisis linier berganda dengan menggunakan Analisis Linier Berganda | Variabel Peneluaran Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif |
| Moza Daegal Orvill Jenira (20 | Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM Propinsi Lampung Tahun 2007 – 2013 | Metode analisis linier berganda dengan menggunakan Analisis Linier Berganda | Alokasi dana sector pendidikan berpengaruh positif dan signifikan dan alokasi dana sector kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |
| Denni Sulistio Mirza | Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006- 2009 | Analisis Regresi dengan menggunakan data panel | Kemiskinan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |
| Miftahur Royan | Pengaruh Investasi Publik dan Swasta terhadap Peningkatan IPM di Jatim | Regresi Linier Berganda | Investasi public dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jatim |
| Tri Maryani | Analisis IPM di Provinsi Jateng | Analisis Panel Data | Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM |
| Evi Sarwenda h H | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Pakpak Barat Sumatera Utara | Metode Regresi Berganda | Hanya Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang signifikan terhadap IPM |
| Vicky Kresno Kuncoro | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki | Analisis regresi linier berganda dengan metode Panel data | Hanya Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang signifikan terhadap IPM |

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

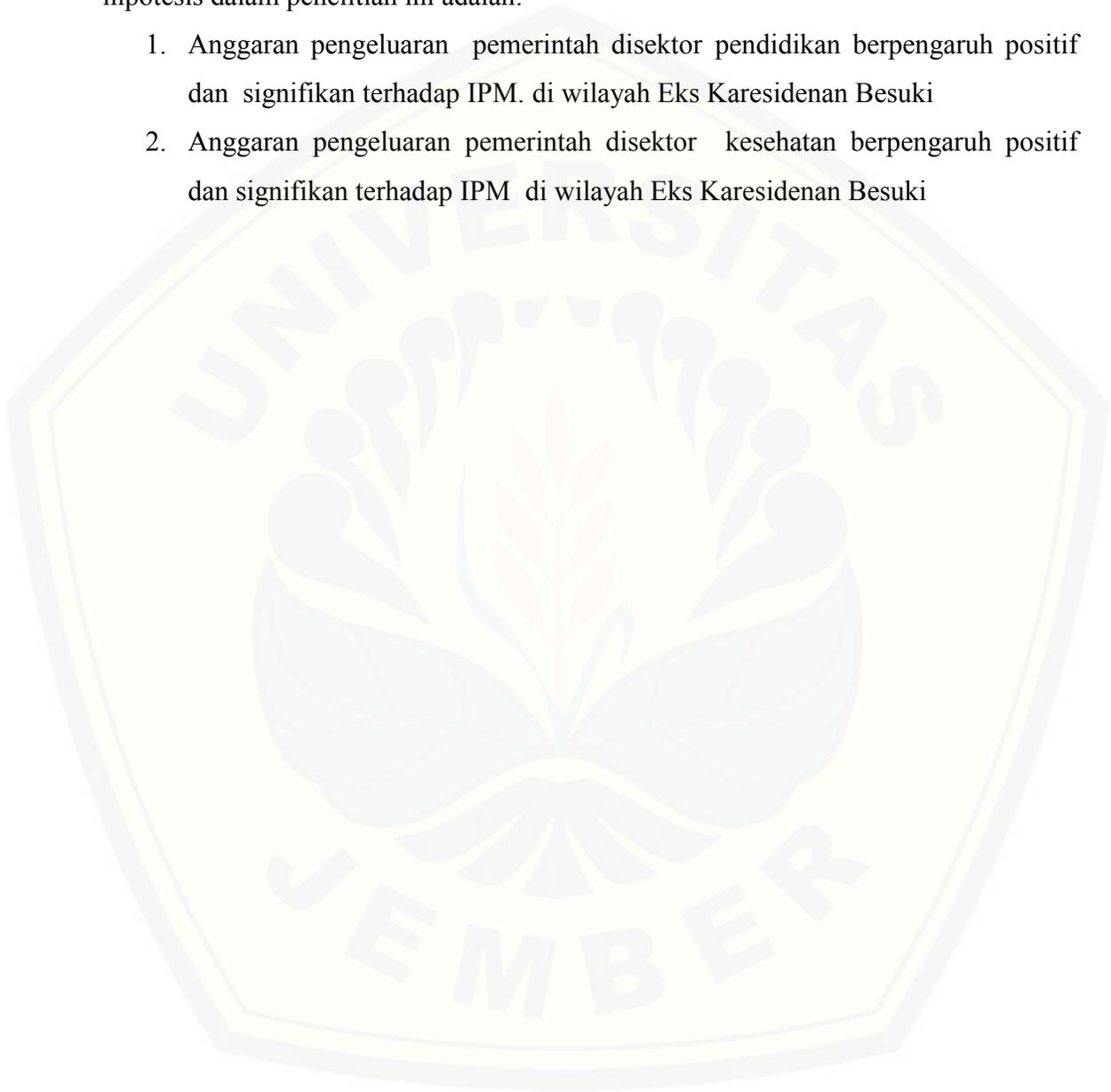
Keterangan:

Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia merupakan dua elemen tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah atau Negara. Kedua unsur tersebut dapat tercapai apabila wilayah atau Negara tersebut melaksanakan pembangunan ekonomi. Menurut teori Klasik, faktor yang dominan mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah penanaman modal. Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta+asing. Investasi pemerintah diantaranya adalah investasi di bidang pendidikan dan investasi di bidang kesehatan.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Anggaran pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. di wilayah Eks Karesidenan Besuki
2. Anggaran pengeluaran pemerintah disektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Eksplanatory Research yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk menjelaskan pengaruh hubungan variable independen terhadap variable dependen yang diamati dan dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis secara statistik dan ekonometrik.(Dajan, 2000)

3.1.2. Unit Analisis dan Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di wilayah Karesidenana Besuki yang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Jika dilihat dari perkembangannya, keempat kabupaten tersebut mempunyai karakteristik dan corak kegiatan ekonomi yang hamper sama yaitu masih bertumpu pada sektor pertanian. Fokus penelitian ini mencakup pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Karesidenan Besuki Dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu 2006 – 2013.karena pada tahun tersebut perekonomian diwilayah tersebut dianggap stabil

3.1.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Data skunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh dari instansi terkait. Pada penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan, di wilayah Karesidenan Besuki. Data pada penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dengan data cross section. Data time

series berupa data periode 2006-2013, sedangkan data cross section adalah data kabupaten/kota di Satuan Wilayah Karesidenan Besuki.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Analisis Deskriptif

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Mohammad Nazir,2005:54).

Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

3.2.2. Analisis Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data runtut waktu meliputi satu objek/individu, tetapi meliputi beberapa periode. Data silang (cross section) terdiri dari beberapa atau banyak objek, sering disebut responden dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu.

Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross

section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variable):

1. Model Pooled Least Square (Common Effect)

Model Pooled Least Square adalah pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.

2. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Model Fixed Effect adalah pendekatan yang memperbolehkan intercept bervariasi antar unit cross section, namun tetap mengasumsikan slope koefisien adalah konstan antar unit cross section .

3. Model Pendekatan Efek Acak (Random Effect)

Model Random Effect adalah model pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki efisiensi proses least squares dengan memperhitungkan error dari cross section dan time series. Model ini variasi dari estimasi generalized least squares.

3.2.3. Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Dajan, 2000:193) :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- X1 = pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan
- X2 = pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan
- b₀ = konstanta
- b₁, b₂ = koefisien regresi dari masing-masing variabel
- e = Variabel pengganggu

Untuk memperoleh model regresi linier berganda yang bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimation) maka model regresi tersebut harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik (Gujarati, 2000) yaitu sebagai berikut :

3.2.4. Uji Statistik

Uji statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah digunakan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan Eviews, selain itu juga digunakan software Microsoft Excel sebagai software pembantu dalam mengkonversi data kedalam bentuk baku oleh sumber kedalam bentuk yang lebih representative untuk digunakan pada software utama dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan data bila dibandingkan dengan pencatatan ulang manual. Uji yang dilakukan adalah:

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdiri dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia. (Supranto, 1995:268). Rumus untuk menghitung nilai F tes adalah:

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara simultan;

R^2 = koefisien determinasi;

k = banyaknya variabel;

n = banyaknya sampel;

k-1 = derajat bebas pembilang;

n-k = derajat bebas penyebut.

Rumusan Hipotesis :

$H_0 : b_1, b_2 = 0$, H_0 diterima, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_1 : b_1, b_2 \neq 0$, H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan asumsi $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

1. Bila probabilitas F hitung $\leq \alpha$, berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Bila probabilitas F hitung $> \alpha$, berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat

2.. Uji t (Uji Parsial)

Sedangkan uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat

$$t = b_i / (S(b_i))$$

Dimana :

t = pengujian secara parsial;

b_i = besarnya perubahan dari variabel bebas;

$S(b_i)$ = standart error atau taksiran kesalahan.

Rumus Hipotesis :

$H_0 : b_i = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh nyata antara variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_1 : b_i \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh nyata antara variable pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dengan menggunakan asumsi $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

1. Bila probabilitas thitung $\leq \alpha$, berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Bila probabilitas thitung $> \alpha$, berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi Ganda)

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat dengan batas nilai dari R^2 adalah $0 < R^2 < 1$. (Suprpto, 1995:206), dengan rumus:

$$R^2 = \text{ESS} / \text{TSS}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi;

ESS = Jumlah kuadrat regresi;

TSS = jumlah kuadrat (regresi+residual).

Kriteria dari R^2 adalah :

1. Apabila nilai R^2 hampir mendekati 1, maka kontribusi variable pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah besar;
2. Apabila nilai R^2 hampir mendekati 0, maka kontribusi variable pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah kecil atau tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.2.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linier klasik atau tidak. Indikator ini penting karena berhubungan erat dengan estimator OLS (Ordinary least Square). Uji asumsi klasik ini meliputi uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi tersebut bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autikorelasi.

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2003) multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau

hampir sempurna antara beberapa variable independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen apabila nilai R^2 yang dihasilkan dalam suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinieritas (Gujarati, 2003). Untuk mendeteksi masalah multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

Korelasi antar variabel (correlation matrix); Menggunakan korelasi parsial.

Sedangkan apabila model regresi terkena multikolinieritas, maka langkah yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menghapus salah satu variabel multikolinier, sepanjang tidak menyebabkan spesifikasi eror (specification error) (Yarnest, 2004:68).

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesalahan penyangga yang dimiliki varians sama atau tidak. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui heteroskedastisitas adalah dengan uji spearmen, yaitu mengkorelasi antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Apabila diketahui nilai uji parsial menunjukkan angka lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika angka lebih kecil dari 5%, maka terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan metode uji spearmen, dapat juga dilakukan dengan metode glejser. Metode glejser merupakan seorang ahli ekonometrika dan mengatakan bahwa nilai variasi variabel error model regresi tergantung dari variabel bebas. Glejser menyarankan untuk melakukan regresi nilai mutlak residual dengan variabel bebas. Jika hasil uji F dari model regresi yang diperoleh tidak signifikan, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah alat ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi menurut Gujarati 2000:215, yaitu Metode Grafik; Metode h-statistik; Uji Durbin Watson (DW test); Uji Lagrange Multiplier (LM test).

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak. Regresi yang baik adalah berada di distribusi normal ataukan mendekati normal. Mendekati normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013). Dasar pengambilan keputisannya antara lain:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Cara lain untuk menguji apakah normal atau tidaknya factor pengganggu adalah dengan menggunakan Jarque-bera test (JB test). Yaitu dengan cara melihat angka probabilitasnya.

3.3. Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan manusia, merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu :indeks harapan hidup diukur dengan angka harapan lahir, indeks pendidikan diukur bedasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan indeks pendapatan diukur dengan daya beli konsumsi perkapita. Satuan yang digunakan adalah satuan indeks
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah dan alokasi pendidikan melalui transfer di daerah termasuk gaji pendidik namun tidak termasuk anggaran pendidikan

kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. dalam satuan juta rupiah per tahun.

3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah alokasi anggaran pada fungsi kesehatan yang dianggarkan oleh pemerintah dan alokasi anggaran kesehatan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, kelompok dan masyarakat. dalam satuan juta rupiah per tahun.



BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Wilayah Eks Karesidenan Besuki merupakan daerah yang berada di wilayah bagian timur provinsi Jawa Timur. Daerah ini meliputi beberapa kabupaten dan kota yang meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.

A. Kabupaten Jember

Secara geografis kabupaten Jember berada pada posisi 7056'6" sampai 8033'56" lintang selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" bujur timur. Luas kabupaten Jember adalah 3.293,34 Km² dengan ketinggian 0-3.330 mdpl. Iklim kabupaten Jember adalah tropis dengan suhu antara 23⁰-32⁰. Karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Kabupaten Jember memiliki sekitar 82 pulau dan pulau yang terbesar adalah pulau Nusa Barong. Wilayah barat daya kabupaten Jember memiliki dataran dengan ketinggian 0-25 meter dpl. Daerah timur laut yang berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian diatas 1000 meter dpl.

B. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat 7,43⁰- 8,46⁰ lintang selatan dan 113,53⁰-114,38⁰ bujur timur. Ibukota dari Kabupaten Banyuwangi adalah Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak paling timur pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km² dengan kepadatan penduduk 432 juta jiwa/km² yang terdiri dari 24 kecamatan dan

217 kelurahan/desa. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Selatan | : Samudra Hindia |
| Sebelah Utara | : Kabupaten Situbondo |
| Sebelah Timur | : Selat Bali |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso |

C. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 Km² dengan kepadatan penduduk 471 jiwa/km² dan secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS. Inukota kabupaten Bondowoso adalah Bondowoso. Letak kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menjadi penghubung antar provinsi. Kabupaten juga tidak memiliki lautan, sehingga sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan dan 219 kelurahan atau desa. Secara wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Jember |
| Sebelah Utara | : Kabupaten Situbondo |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Banyuwangi |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Probolinggo |

D. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa. Kabupaten Situbondo terletak pada koordinat 7° 35' - 7° 44' Lintang Selatan dan 113° 30' - 114° 42' Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Situbondo adalah Situbondo. Secara administrasi Kabupaten Situbondo memiliki terdiri dari 17 kecamatan dan 136 kelurahan/desa. Diantara keempat kabupaten yang terletak di Eks Karesidenan Besuki, Kabupaten Situbondo memiliki luas yang paling sempit yaitu 1.457,10 km²

dengan kepadatan penduduk 391 juta jiwa/km². Secara geografis Kabupaten Situbondo memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

4.1.2 Keadaan Perekonomian Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Keadaan perekonomian di kabupaten dan kota pada wilayah Eks Karesidenan Besuki mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PDRB tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan PDRB daerahnya melalui setiap kebijakan. Peningkatan PDRB setiap kabupaten dan kota pada daerah Eks Karesidenan Besuki juga dapat dilihat dari sumbangan dari setiap sektor terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada setiap wilayah:

A. Kabupaten Jember

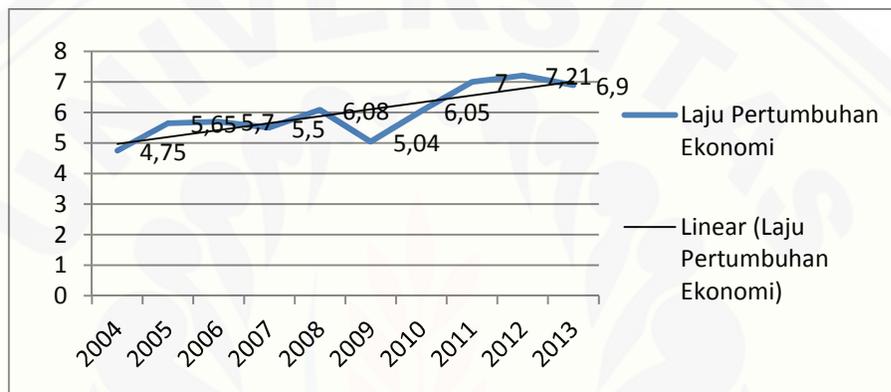
PDRB Kabupaten Jember selama tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang dihasilkan setiap tahunnya yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1: PDRB Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

| No. | Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Laju Pertumbuhan (persen) |
|-----------|-------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2004 | 7.821.292,24 | 4,75 |
| 2 | 2005 | 8.236.276,67 | 5,65 |
| 3 | 2006 | 8.705.996,37 | 5,70 |
| 4 | 2007 | 9.283.403,37 | 5,50 |
| 5 | 2008 | 9.039.203,33 | 6,08 |
| 6 | 2009 | 10.429.382,62 | 5,04 |
| 7 | 2010 | 11.550.549,44 | 6,16 |
| 8 | 2011 | 12.359.522,18 | 7,00 |
| 9 | 2012 | 13.250.929,79 | 7,21 |
| 10 | 2013 | 14.165.901,52 | 6,90 |
| Rata-rata | | 10,484,245.75 | 6 |

Sumber: BPS Jawa Timur tahun 2014

. Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang menghasilkan PDRB sebesar 5.205.901,00. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena masih besarnya jumlah luas lahan yang digunakan untuk sektor tersebut. Rata rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember selama 10 tahun adalah sebesar 6 persen. (BPS Kab. Jember tahun 2004-2014). Peningkatan PDRB juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang ditunjukkan oleh gambar 4.1 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

Dari gambar. 4.1 diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mengalami trend meningkat/ Kabupaten Jember mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar -0,2 persen; tahun 2009 sebesar -0,12 persen dan tahun 2013 sebesar -0,3 persen.

B. Kabupaten Banyuwangi

PDRB Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari jumlah PDRB per tahun yang ditunjukkan dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa PDRB Kabupaten Banyuwangi dilihat dari jumlah PDRB tahun 2004 sampai 2013 berdasarkan harga konstan 2000 mengalami peningkatan setiap tahun. Rata rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 5.93 persen Sumbangan terbesar terhadap PDRB

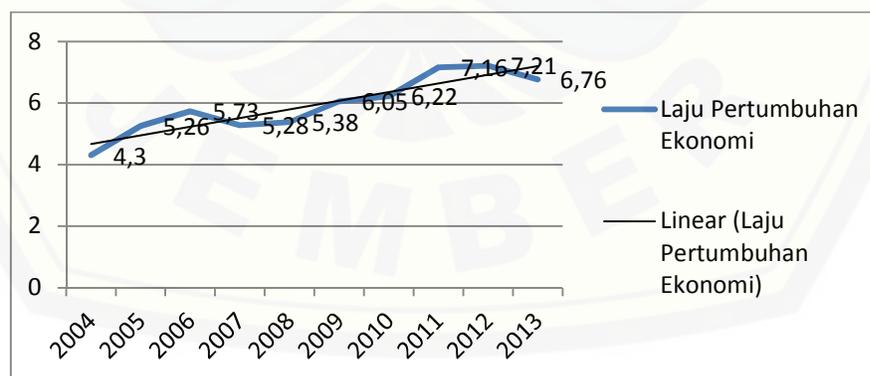
Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 adalah pada sektor pertanian sebesar 5.993.530,88 dengan sub sektor tanaman bahan pangan yang terbesar yaitu 2.992.352,71

Tabel 4.2. PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

| No. | Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Laju pertumbuhan (Persen) |
|-----------|-------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2004 | 8.246.598,38 | 4,30 |
| 2 | 2005 | 8.629.977,22 | 5,76 |
| 3 | 2006 | 8.803.446,58 | 5,73 |
| 4 | 2007 | 9.317.782,48 | 5,28 |
| 5 | 2008 | 9.863.910,93 | 5,38 |
| 6 | 2009 | 10.370.280,26 | 5,36 |
| 7 | 2010 | 11.015.195,17 | 6,26 |
| 8 | 2011 | 11.804.189,97 | 7,22 |
| 9 | 2012 | 12.655.586,32 | 7,27 |
| 10 | 2013 | 13.511.707,90 | 6,76 |
| Rata-rata | | 10,421,867.52 | 5.93 |

Sumber: BPS Jawa Timur tahun 2014

. Sumbangan sektor pertanian terbesar disebabkan oleh masih luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi PDRB Kabupaten Banyuwangi juga dapat dilihat dai pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.2: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami trend meningkat, Penurunan PDRB terjadi pada tahun 2007 sebesar -0,5 persen dan tahun 2013 sebesar 0,5 persen. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se Eks Karesidenan Besuki.

C. Kabupaten Bondowoso

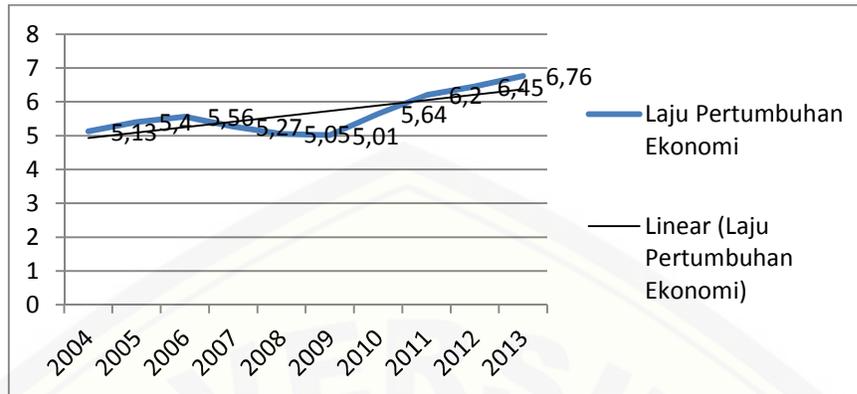
PDRB Kabupaten Bondowoso selama 10 tahun terakhir dimulai tahun 2004-2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. PDRB Kabupaten Bondowoso dilihat dari *Product Domestik Regional Bruto* (PDRB) ditunjukkan dengan tabel 4.3 berikut:

Tabel: 4.3: PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

| No. | Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Laju pertumbuhan |
|-----------|-------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2004 | 1.699.772,23 | 5,13 |
| 2 | 2005 | 1.792.354,41 | 5,40 |
| 3 | 2006 | 2.622.171,38 | 5,56 |
| 4 | 2007 | 2.777.065,31 | 5,27 |
| 5 | 2008 | 2.924.690,18 | 5,05 |
| 6 | 2009 | 2.978.906,80 | 4,96 |
| 7 | 2010 | 3.146.982,26 | 5,69 |
| 8 | 2011 | 3.341.964,11 | 6,20 |
| 9 | 2012 | 3.557.683,76 | 6,45 |
| 10 | 2013 | 3.780.574,42 | 6,76 |
| Rata-rata | | 2,862,216.49 | 5.65 |

Sumber: BPS Jawa Timur tahun 2014

PDRB Kabupaten Bondowoso berdasarkan PDRB harga konstan 2000 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan semua sektor. Sumbangan terbesar adalah pada sektor pertanian sebesar 1.627.483,36 pada tahun 2013. Rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso selama 10 tahun adalah sebesar 5.65 persen Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB dikarenakan pada Kabupaten Bondowoso masih banyak terdapat lahan pertanian dan mayoritas penduduknya merupakan petani. Kabupaten Bondowoso dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam gambar 4.3



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

Berdasarkan gambar 4.3. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami trend meningkat. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2007 sebesar -0,3 persen; tahun 2008 sebesar -0,2 persen; tahun 2009 sebesar -0,04 persen.

D. Kabupaten Situbondo

PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB tersebut dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) setiap sektor. PDRB tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.4

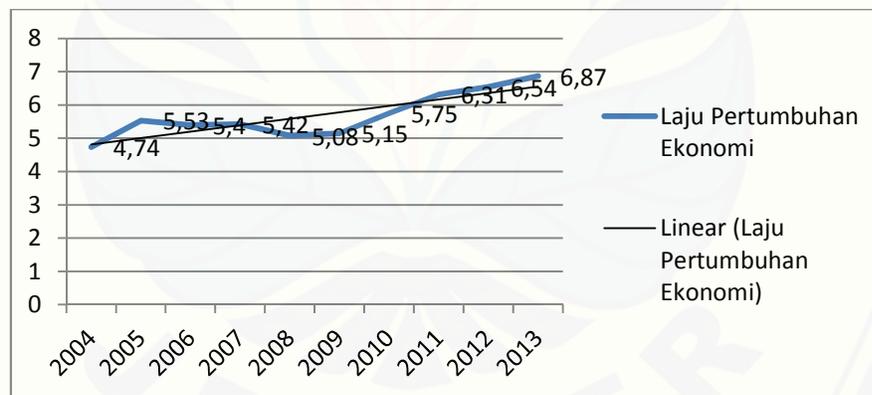
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Situbondo berdasarkan harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun adalah sebesar 5.15 persen. Sumbangan sektor terbesar pada PDRB Kabupaten Situbondo adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1.581.902,45 pada tahun 2013. Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan pesisir memiliki banyak pantai sehingga terdapat banyak kawasan wisata, hal tersebut yang menjadikan sumbangan terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 4.4: PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

| No. | Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Laju Pertumbuhan (persen) |
|-----------|-------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2004 | 2.710.867,19 | 4,74 |
| 2 | 2005 | 2.856.262,69 | 5,53 |
| 3 | 2006 | 2.858.609,20 | 5,40 |
| 4 | 2007 | 3.023.332,13 | 5,42 |
| 5 | 2008 | 3.715.831,50 | 5,08 |
| 6 | 2009 | 3.330.419,83 | 5,15 |
| 7 | 2010 | 3.522.055,33 | 5,75 |
| 8 | 2011 | 3.744.411,60 | 6,31 |
| 9 | 2012 | 3.989.292,96 | 6,54 |
| 10 | 2013 | 4.263.528,37 | 6,87 |
| Rata-rata | | 3,401,461.06 | 5.15 |

Sumber: BPS Jawa Timur tahun 2014

Keadaan ekonomi Kabupaten Situbondo juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo ditunjukkan pada gambar 4.4



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.4: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

Keadaan ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2006 sebesar -0,1 persen; tahun 2008 sebesar -0,4 persen.

4.1.3 Keadaan Penduduk Eks Karesidenan Besuki

A. Kabupaten Jember

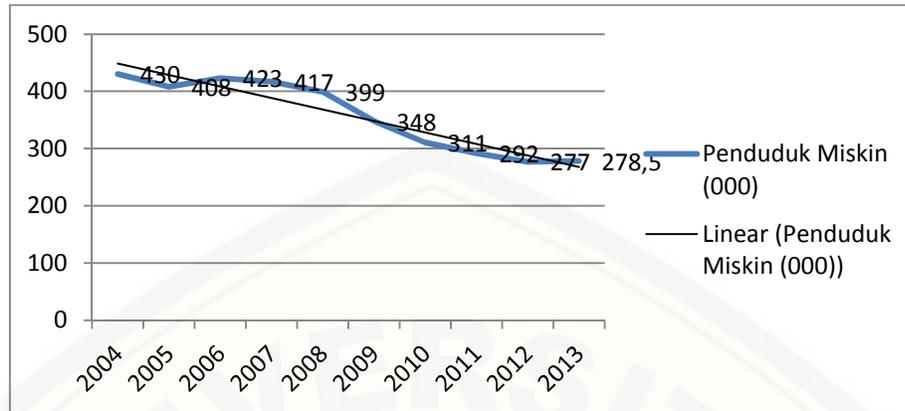
Kabupaten Jember secara administratif terbagi dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4100 RW dan 13.786 RT. Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk paling banyak dan menempati peringkat pertama diantara ketiga kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Jumlah penduduk Kabupaten Jember selama tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

| Tahun | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2004 | 2.136.999 | 0,27 |
| 2005 | 2.141.467 | 0,21 |
| 2006 | 2.146.571 | 0,24 |
| 2007 | 2.153.883 | 0,34 |
| 2008 | 2.168.732 | 0,68 |
| 2009 | 2.179.829 | 0,51 |
| 2010 | 2.332.726 | 0,61 |
| 2011 | 2.345.851 | 0,56 |
| 2012 | 2.355.283 | 0,40 |
| 2013 | 2.529.967 | 0,74 |
| Rata-rata | 2,248,330 | 0.46 |

Sumber: BPS Jawa Timur. 2014

Jumlah penduduk kabupaten Jember pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami rend meningkat. Rata rata pertumbuhan penduduk Kabupaten jember tahun 2004 – 2013 adalah sebesar 0.4 persen. Banyak factor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, diantaranya disebabkan karena adanya perbaikan fasisilitas fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti fasilitas kesehatan pendidikan dan lain lain. Keadaan penduduk dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya seperti ditunjukkan dalam gambar 4.5



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.5: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami trend penurunan setiap tahunnya.. Penurunan tersebut banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Jember masih bekerja sebagai petani sehingga perekonomian Kabupaten Jember masih ditunjang dari sektor pertanian. Kabupaten jember memiliki banyak perkebunan dan sebagian besar merupakan peninggalan Belanda. Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah yang menghasilkan tembakau terbesar di Jawa Timur maupun di Indonesia. Tembakau yang dihasilkan merupakan tembaku yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu dan sangat dikenal di Bremen, Jerman dan Belanda.

B. Kabupaten Banyuwangi

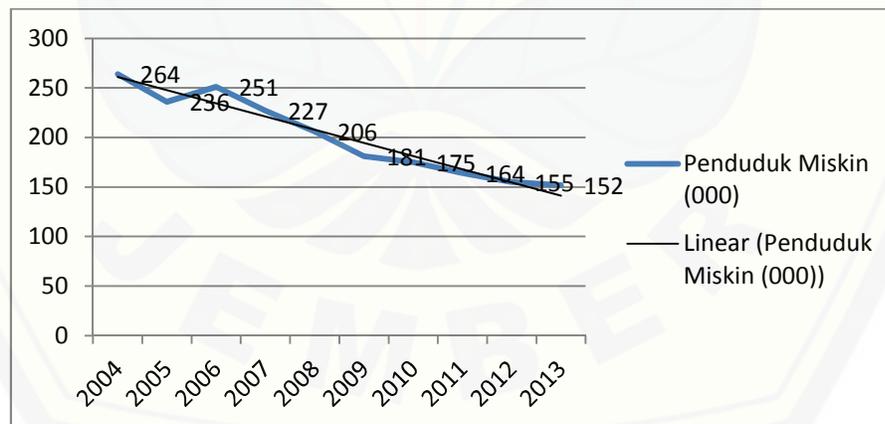
Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi dalam 24 kecamatan yang dibagi dalam sejumlah desa dan kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2004-2013

| Tahun | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2004 | 1.557.436 | - |
| 2005 | 1.575.089 | 0,11 |
| 2006 | 1.576.328 | 0,07 |
| 2007 | 1.580.441 | 0,26 |
| 2008 | 1.583.918 | 0,20 |
| 2009 | 1.550.663 | 0,29 |
| 2010 | 1.556.078 | 0,34 |
| 2011 | 1.564.833 | 0,56 |
| 2012 | 1.568.956 | 0,26 |
| 2013 | 1.574.778 | 0,37 |
| Rata-rata | 1,568,851 | 0.25 |

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami trend meningkat. Rata rata peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2004 – 2013 adalah sebesar 0.246 persen. Keadaan penduduk Kabupaten Banyuwangi dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari gambar 4.6 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

Penurunan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya beberapa program kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

C. Kabupaten Bondowoso

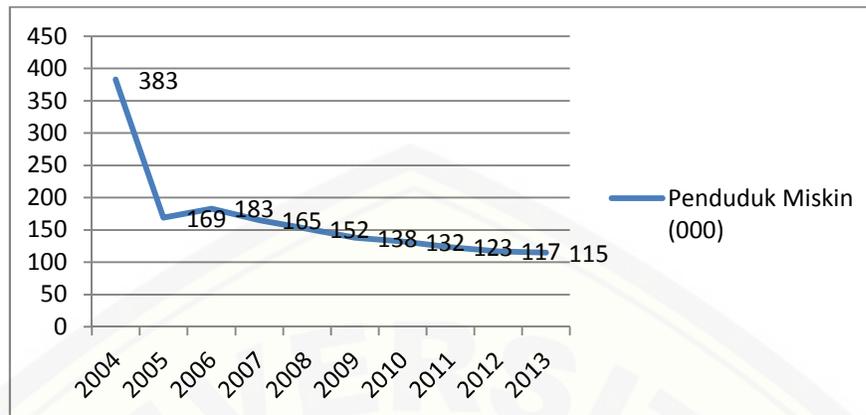
Kabupaten Bondowoso secara administratif terbagi dalam 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah terbesar ketiga di Eks Karesidenan Besuki. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Bondowoso sebesar 72.714 jiwa dan yang terendah berada di kecamatan Sempol sebesar 8.103 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7: Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

| Tahun | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2004 | 710.339 | - |
| 2005 | 720.183 | 0,13 |
| 2006 | 725.571 | 0,74 |
| 2007 | 727.790 | 0,30 |
| 2008 | 707.242 | 0,28 |
| 2009 | 737.807 | 0,43 |
| 2010 | 736.772 | 0,14 |
| 2011 | 740.917 | 0,56 |
| 2012 | 744.067 | 0,42 |
| 2013 | 755.826 | 0,15 |
| Rata-rata | 730,651.4 | 0.315 |

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Tabel 4.7 Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bondowoso selama tahun 2004 – 2013 adalah sebesar 0.315 persen pertahun. pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 0.74 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk turun menjadi sebesar 0.15 persen pertahun. Gambar 4.7 menggambarkan tentang besarnya pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.7: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

Gambar 4.7 menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowosa mengalami trend menurun

D. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan pasar, taman kota, lalu lintas dan lainnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo meresmikan *second city* of Situbondo yang terletak di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus di wilayah timur. Pada tahun 2004 sampai 2013 jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mengalami trend meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.8.

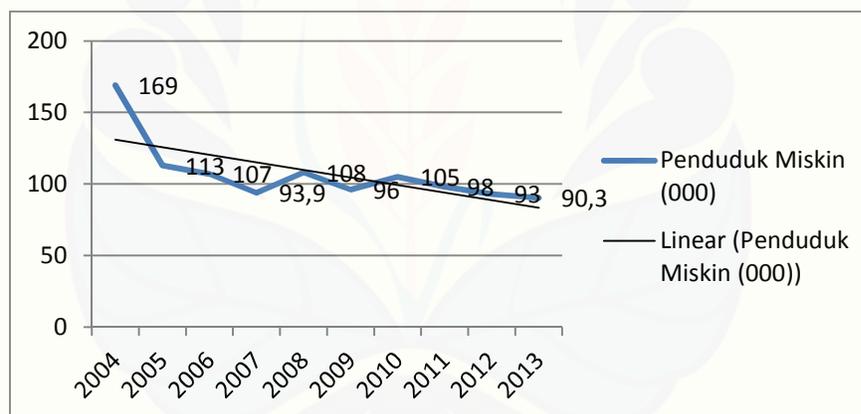
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo selama tahun 2004 – 2013 adalah sebesar 0.379 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0.59 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami penurunan.

Tabel 4.8: Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

| Tahun | Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2004 | 621.624 | - |
| 2005 | 631.382 | 0,15 |
| 2006 | 636.200 | 0,76 |
| 2007 | 638.537 | 0,36 |
| 2008 | 623.042 | 0,24 |
| 2009 | 643.815 | 0,33 |
| 2010 | 647.619 | 0,59 |
| 2011 | 651.263 | 0,56 |
| 2012 | 654.153 | 0,44 |
| 2013 | 677.852 | 0,36 |
| Rata-rata | 642,548.7 | 0.379 |

Sumber: BPS, Jawa Timur, 2014

Gambaran tentang jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari gambar 4.8



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.8: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa seiring dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Situbonodo, hal ini berdampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo sebesar 169 juta jiwa dan pada tahun 2013 turun menjadi 152,2 juta jiwa, atau mengalami penurunan sebesar 9.94 persen.

4.14 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Belanja modal diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan dengan mempertimbangkan analisa standar belanja, standar harga dan tolak ukurnya sesuai dengan perundang-undangan (UU 32/2004). Wilayah Eks Karesidenan Besuki meliputi 4 kabupaten yaitu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Realisasi belanja modal wilayah Eks Karesidenan Besuki dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9: Realisasi Belanja Modal Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2013

| Tahun/ Kabupaten | Kab. Jember | Kab. Banyuwangi | Kab. Situbondo | Kab. Bondowoso |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2004 | 108.606.577 | 54.692.409 | 29.731.987 | 25.319.495 |
| 2005 | 78.442.447 | 46.258.938 | 19.252.068 | 28.614.622 |
| 2006 | 237.704.210 | 153.437.812 | 107.252.829 | 72.728.259 |
| 2007 | 232.444.294 | 239.535.649 | 124.143.502 | 80.968.621 |
| 2008 | 274.510.234 | 161.726.445 | 134.471.005 | 88.554.947 |
| 2009 | 226.759.413 | 299.667.852 | 122.887.794 | 112.005.479 |
| 2010 | 80.974.389 | 145.857.931 | 72.033.947 | 47.599.221 |
| 2011 | 210.061.688 | 250.847.215 | 120.719.312 | 169.878.280 |
| 2012 | 372.743.795 | 355.812.307 | 155.800.530 | 210.599.591 |
| 2013 | 517.153.537 | 411.268.733 | 249.807.579 | 179.134.659 |
| Rata-rata | 233,940,058.4 | 170,783,655.8 | 113,610,055.3 | 111,532,317.4 |

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa belanja modal pada setiap kabupaten cenderung meningkat setiap tahun. Pada Kabupaten Jember realisasi belanja modal terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 517.153.537. Realisasi belanja modal Kabupaten Banyuwangi juga terjadi pada tahun 2013 sebesar 411.268.733. Kabupaten Situbondo 249.807.579 juga terbesar yang terjadi pada tahun 2013. Realisasi belanja modal Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 adalah sebesar 179.134.659 merupakan belanja modal terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

4.15. Realisasi Anggaran Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kesehatan diwilayah Karesidenan

Besuki Tahun 2006; 2013

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terbukti mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan yakni pemerintah harus tetap mempertahankan pengalokasian anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Disuatu wilayah. Gambaran realisasi pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Karesidenan Besuki dapat dilihat pada table 4.10 dan table 4.11

Tabel 4.10 : Anggaran Belanja Pemerintah dibidang Pendidikan pada Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah)

| Kabupaten/ Tahun | Kab. Jember | Kab. Banyuwangi | Kab. Situbondo | Kab. Bondowoso |
|---------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2006 | 281,630 | 336,300 | 148,120 | 156,390 |
| 2007 | 395,593 | 383,728 | 173,042 | 187,548 |
| 2008 | 471,037 | 427,886 | 203,622 | 193,388 |
| 2009 | 509,813 | 225,707 | 258,127 | 272,959 |
| 2010 | 552,401 | 186,849 | 261,942 | 279,862 |
| 2011 | 907,559 | 344,766 | 383,581 | 345,957 |
| 2012 | 1,050,270 | 816,841 | 440,418 | 443,122 |
| 2013 | 1,186,384 | 809,353 | 488,790 | 508,402 |
| Rata-rata | 669,335,875 | 441,428.75 | 294,705.25 | 298,453.5 |

Lampiran: BPS Jawa Timur 2014

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa realisasi dana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di wilayah karesidenan Besuki menunjukkan trend meningkat. Peningkatan alokasi dana untuk pendidikan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Karesidenan Besuki.

Tabel 4.11 : Anggaran Belanja Pemerintah dibidang Kesehatan pada Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah)

| Kabupaten/ Tahun | Kab. Jember | Kab. Banyuwangi | Kab. Situbondo | Kab. Bondowoso |
|---------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2006 | 57,344 | 68,624 | 32,626 | 45,253 |
| 2007 | 132,677 | 79,333 | 34,567 | 56,539 |
| 2008 | 135,546 | 81,243 | 40,981 | 66,560 |
| 2009 | 142,683 | 84,389 | 54,778 | 75,903 |
| 2010 | 167,924 | 65,881 | 63,484 | 87,852 |
| 2011 | 204,949 | 74,293 | 100,280 | 107,532 |
| 2012 | 227,944 | 154,040 | 111,158 | 116,702 |
| 2013 | 300,304 | 191,542 | 127,817 | 125,380 |
| Rata-rata | 171,171.37 | 99,918.12 | 70,711.38 | 85,215.13 |

Lampiran: BPS Jawa Timur 2014

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa realisasi dana pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan di wilayah karesidenan Besuki juga menunjukkan trend meningkat. Peningkatan alokasi dana untuk kesehatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat serta dan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Karesidenan Besuki.

4.16 Hasil Analisis Skalogram di wilayah Karesidenan Besuki

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindya Aditya Putra menggambarkan hasil analisis skalogram di wilayah Eks. Karesidenan Besuki menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Jember berperan sebagai pusat pertumbuhan (lihat tabel 4.12).

Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Analisis Skalogram

| No | Kabupaten | Jumlah Fasilitas | Jumlah Unit | Peringkat |
|----|------------|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Jember | 19 | 59052 | 1 |
| 2 | Banyuwangi | 19 | 25476 | 2 |
| 3 | Bondowoso | 18 | 19839 | 3 |
| 4 | Situbondo | 17 | 14230 | 4 |

Sumber: Hasil Penelitian Nindya Aditya Putra

Tabel 4.12 mengenai perhitungan skalogram menunjukkan Kabupaten Jember mempunyai fasilitas terbanyak sejumlah 59.052 unit dan menjadi salah satu dari dua wilayah yang memiliki fasilitas terlengkap dari 19 jenis fasilitas yang menjadi obyek penelitian. Urutan kedua ditempati Kabupaten Banyuwangi dengan total fasilitas 25476 unit. Urutan ketiga diraih Kabupaten Bondowoso yang memiliki fasilitas dengan jumlah 19.839 unit dengan kelengkapan fasilitas sebesar 18 atau tidak mempunyai satu fasilitas yang menjadi obyek penelitian. Urutan keempat Kabupaten Situbondo yang memiliki fasilitas sejumlah 14.230 unit dan memiliki kelengkapan fasilitas sebanyak 17 fasilitas atau tidak memiliki dua jenis fasilitas.

4.17 Hasil Analisis Shift Share di wilayah Karesidenan Besuki

Hasil penelitian Nindya Aditia Putra memperlihatkan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh wilayah di Karesidenan Besuki adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 . Hasil Analisis Shift Share Dalam Kurun Waktu Selama Tahun 2008 - 2013

| No | Lapangan Usaha | Jember | Banyuwangi | Bondowoso | Situbondo |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 74.125,91232 | 127.775,396 | 21.079,73038 | 14.315,3346 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 495,5031176 | 4.944,905524 | -328,0293098 | -1.807,379835 |
| 3 | Industri Pengolahan | 23.418,7511 | 7.998,997535 | 5.297,577114 | 3.873,186039 |
| 4 | Listrik, Gas & Air Bersih | 1.109,950004 | -141,1660679 | 82,41469299 | -6,268729718 |
| 5 | Bangunan | 2.943,960829 | 1.156,457983 | 310,1835291 | -1.516,160601 |
| 6 | Perdagangan, Hotel & Restoran | 14.637,96635 | 29.055,89919 | -225,873756 | -8.385,875976 |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi | -13.844,71411 | -23.250,32735 | -1.561,571979 | -8.202,822199 |
| 8 | Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh. | 958,6820722 | -7.918,744571 | 1,242570935 | -970,4460932 |
| 9 | Jasa-Jasa | 19.923,03351 | 5.419,187503 | 2.245,719549 | 3.518,802675 |

Sumber: Sumber: Hasil Penelitian Nindya Aditya Putra

Tabel 4.13 menggambarkan bahwa Kabupaten Jember memiliki keunggulan kompetitif terbanyak. Dari Sembilan sektor, ada delapan sektor masuk dalam kategori mempunyai keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan, sektor jasa-jasa.

Kabupaten Banyuwangi memiliki enam sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, sektor jasa –jasa.

Kabupaten Bondowoso memiliki enam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa.

Kabupaten Situbondo merupakan Kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif paling sedikit dibandingkan ketiga wilayah lain di Eks Karesidenan Besuki. Kabupaten Situbondo hanya mempunyai tiga sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa.

4.18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Eks Karesidenan Besuki

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar yaitu: a) Indeks harapan hidup yang diukur dengan angka harapan lahir, b) Indeks pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan c) Indeks pendapatan diukur dengan pendapatan dan daya beli masyarakat. UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkanempat klasifikasi yaitu: low (IPM kurang dari 50), lower medium (IPM antara 50 dan 65.99), upper medium (IPM antara 66 dan 79.99) dan high (IPM 80 ke atas). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Eks Karesidenan Besuki pada tahun 2004 sampai tahun 2013 dapat dilihat dari tabel 4.14

Tabel 4.14 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013

| Kabupaten/ Tahun | Kab. Jember | Kab. Banyuwangi | Kab. Situbondo | Kab. Bondowoso |
|---------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2006 | 63,04 | 66,80 | 61,79 | 60,36 |
| 2007 | 63,27 | 67,24 | 62,64 | 60,76 |
| 2008 | 63,71 | 67,80 | 63,06 | 61,26 |
| 2009 | 64,33 | 68,36 | 63,69 | 62,11 |
| 2010 | 64,95 | 68,89 | 64,26 | 62,94 |
| 2011 | 65,53 | 69,58 | 64,67 | 63,81 |
| 2012 | 65,99 | 70,53 | 65,06 | 64,98 |
| 2013 | 66,60 | 71,02 | 65,73 | 65,39 |
| Rata-rata | 64.68 | 68.78 | 63.86 | 62.73 |

Lampiran: BPS Jawa Timur 2014

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui rata-rata pencapaian IPM selama tahun 2004-2013 masing-masing kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak ada yang masuk dalam kategori *low* dan kategori *high*, tetapi keseluruhan rata-rata IPM masing masing kabupaten berada dalam kategori *upper medium*. Kondisi demikian menunjukkan peningkatan yang baik dalam pencapaian IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2004-2013.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Pengujian model Data Panel

Dalam penelitian ini, analisis model panel data yang digunakan yaitu pendekatan *fixed effect* dan pendekatan efek acak *random effect*. Metode *fixed effect* digunakan untuk memprediksi kemungkinan adanya masalah yang dapat merubah intersept pada time series dan cross section, sedangkan *random effect* digunakan dengan asumsi adanya korelasi pada observasi time series.

Uji Hausman dilakukan untuk memilih kesesuaian model menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Statistik Uji Hausman mengikuti *chi square* dengan *degge of freedom* sebanyak jumlah variabel bebas dari model (Nurchayono, 2014: 26). Dengan ketentuan H_0 dari Uji Hausman yaitu *random effect* dan H_1 dari Uji Hausman yaitu *fixed effect*. Berikut regresi data panel *fixed effect* dan hausman test yang ditunjukkan pada tabel 4.1

Tabel 4.15 hasil uji hausman test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 0.681336 | 2 | 0.7113 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| PENGPEN? | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.6713 |
| PENGGES? | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.7589 |

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil uji Hausman tes diperoleh nilai kritis *statistic chi square* angka probabilitasnya adalah 0.7113 yang menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Sehingga dengan demikian hipotesis nol (H_0) diterima dan model yang digunakan *Random effect*.

4.2.2. Analisis Regresi Data Panel

Pengolahan data panel dengan *Random effect* secara umum dilakukan dengan *Pooled Least Squares*. Hasil pengolahan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Random effect* bertujuan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun 2006-2013. Keputusan yang digunakan dalam membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Berikut adalah hasil estimasi persamaan regresi pooled data dengan pendekatan *Random effect*.

Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Random Effect

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | 62.32331 | 1.889251 | 32.98838 | 0.0000 |
| PENGPEN? | 3.85E-18 | 2.07E-18 | 1.861984 | 0.0728 |
| PENGPES? | 2.46E-14 | 3.27E-15 | 7.528037 | 0.0000 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _JEMBER—C | -1.847603 | | | |
| _BANYUWANGI—C | 3.968084 | | | |
| _SITUBONDO—C | -0.200354 | | | |
| _BONDOWOSO--C | -1.920127 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| | | S.D. | Rho | |
| Cross-section random | | 3.702332 | 0.9500 | |
| Idiosyncratic random | | 0.849265 | 0.0500 | |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.701010 | Mean dependent var | 5.254651 | |
| Adjusted R-squared | 0.680390 | S.D. dependent var | 1.467666 | |
| S.E. of regression | 0.829732 | Sum squared resid | 19.96518 | |
| F-statistic | 33.99657 | Durbin-Watson stat | 0.759840 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber: Lampiran A. (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa ,dengan pendekatan *Random effect* dapat dilihat bagaimana pengaruh variable pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan dalam mempengaruhi IPM diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 62.32331 + 3.85E-18 X_1 + 2.46E-14 X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Hasil estimasi *Random effect* dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini adalah sebesar 62.32331 artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan konstan, maka besarnya IPM adalah sebesar 62.3233.satuan indeks
2. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan adalah sebesar 3.85E-18. Artinya apabila variable pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan meningkat sebesar Rp. 1,000.000, maka IPM akan meningkat sebesar 3.85E-18 dengan asumsi pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan konstan
3. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan adalah sebesar 2.46E-14 Artinya apabila nilai variable pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan meningkat sebesar Rp. 1,000.000, maka i IPM akan meningkat sebesar 2.46E-14 dengan asumsi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan konstan

4.2.3. Uji Statistik

Uji Statistik merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan tiga pengujian, yaitu; Uji F, Uji t dan R^2 . Hasil dari uji secara simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi berganda (R^2)

a. Uji Simultan (Uji F)

Hasil Probabilitas F-statistik = 0.000000 \leq nilai probabilitas $\alpha = 5\%$, berarti H_1 diterima yang artinya seluruh variabel bebas yaitu variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama sama berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi Nilai IPM

b. Uji Parameter Individual (Uji t)

Hasil Probabilitas t hitung variable variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan = $0.07280 \geq$ nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Probabilitas t hitung variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah sebesar = $0.00000 \leq$ nilai probabilitas $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin tepat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin lemah kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Hasil perhitungan menunjukkan nilai adjusted R-squared = 0.680390 , hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam mempengaruhi besarnya nilai IPM adalah sebesar 68 persen

4.2.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan empat pengujian, diantaranya adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan dengan adanya tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam Tabel 4.17 akan diketahui hasil dari uji multikolinearitas. Uji

Multikolinearitas menggunakan uji korelasi sederhana. Berikut hasil dari Uji Multikolinearitas.

Tabel 4.17. Hasil Uji Multikolinearitas

| | PENGPEN | PENGGKES |
|----------|----------|----------|
| PENGPEN | 1.000000 | 0.032893 |
| PENGGKES | 0.032893 | 1.000000 |

Sumber: Lampiran A. (diolah)

Hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi dari antar variabel bebas adalah sebesar 0.032893, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan *cross section weights* dengan membandingkan nilai *sum squared resid*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 4.18

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa di dalam model empiris pada kasus pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena nilai Prob (F-Statistik) $> \alpha$ (0.05)

Tabel 4.18 Uji Heterokedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -0.991995 | 1.581902 | -0.627090 | 0.5355 |
| PENGPEN | 3.21E-18 | 1.01E-17 | 0.318918 | 0.7521 |
| PENGGES | 7.47E-15 | 1.29E-14 | 0.579884 | 0.5665 |
| R-squared | 0.015301 | Mean dependent var | -0.148329 | |
| Adjusted R-squared | -0.052609 | S.D. dependent var | 4.277198 | |
| S.E. of regression | 4.388265 | Akaike info criterion | 5.884805 | |
| Sum squared resid | 558.4493 | Schwarz criterion | 6.022218 | |
| Log likelihood | -91.15688 | Hannan-Quinn criter. | 5.930353 | |
| F-statistic | 0.225314 | Durbin-Watson stat | 1.041400 | |
| Prob(F-statistic) | 0.799650 | | | |

Sumber: Lampiran A. diolah

c. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah pada setiap periode t dengan periode $t-1$ terjadi korelasi. Berikut hasil Uji autokorelasi.

Tabel 4.19 Uji Autokorelasi

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.701010 | Mean dependent var | 5.254651 |
| Adjusted R-squared | 0.680390 | S.D. dependent var | 1.467666 |
| S.E. of regression | 0.829732 | Sum squared resid | 19.96518 |
| F-statistic | 33.99657 | Durbin-Watson stat | 0.759840 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Lampiran A. diolah

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa pada Durbin-Watson stat diperoleh nilai sebesar 0.759840. dengan $\alpha = 5\%$, $n = 32$, dan $k = 3$ maka diperoleh $dl = 1.3177$

dan $du = 1.6563$. Jadi d -hitung atau DW tidak terletak diantara dl dan du yang artinya dalam model regresi ini terdapat autokorelasi.

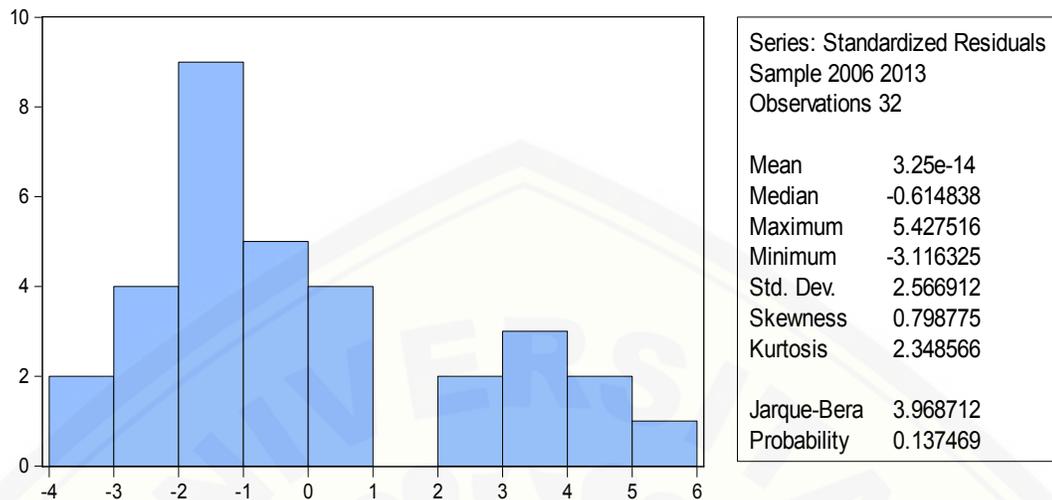
Data panel merupakan data gabungan dari time series dan cross section, sedangkan menurut Rahayu (2009) autokorelasi sering terjadi dikarenakan adanya variabel-variabel penjelas yang dihilangkan dari model. Pada umumnya variabel-variabel ekonomi cenderung mengandung autokorelasi, dimana nilai-nilai dari periode sekarang akan tergantung pada periode sebelumnya. Ariefianto (2012) juga memberikan pendapatnya tentang penyebab autokorelasi, yaitu; Inertia salah satu karakteristik umum dari data yang bersifat time series adalah adanya inertia (sluggishness). Penyesuaian akibat suatu guncangan terhadap variabel makroekonomi adalah bersifat bertahap dan berlangsung sepanjang waktu tertentu.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak digunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test). Adapun kriteria pengujian *Jarque-Bera* (J-B test), antara lain:

- 1) Bila nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
- 2) Bila nilai probabilitas J-B hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal diterima.

Hasil dari uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B test) dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.9 Hasil Uji Normalitas (Sumber: Lampiran A. Diolah)

Dari gambar diketahui bahwa nilai *Jarque Berra* sebesar 3.9687 dan nilai probabilitas X^2 hitung sebesar 0.1374 lebih dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model empiris berdistribusi normal.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji ada atau tidaknya pengaruh antara variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di wilayah Karesidenan Besuki. Cakupan data pada penelitian ini diantaranya 4 kabupaten .yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo dan bondowoso. Tahun 2006 – 2013.

4.3.2. Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap

Indeks Pembangunn Manusia

variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen.. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa, investasi sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat terserap secara optimal untuk dapat meningkatkan produktifitas dan pembangunan. Semakin banyaknya masyarakat yang mampu

menikmati layanan pendidikan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan masyarakat. Bila hal tersebut meningkat pasti akan mendorong produktivitas tenaga kerja. Belanja pemerintah sektor pendidikan yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Akan tetapi butuh waktu dan proses untuk bisa menikmati hasil dari investasi tersebut. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan agar dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Hal ini sesuai dengan teori *human capital* bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat upah dan pendapatan yang tinggi.

Menurut E. Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/ investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian Ilyas (2014) menunjukkan bahwa meningkatnya belanja pemerintah sektor pendidikan terbukti mampu mendorong peningkatan pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan yakni pemerintah harus tetap mempertahankan pengalokasian anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan alokasi belanja sektor pendidikan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang besar untuk sektor pendidikan dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dengan baik. Dengan adanya program pendidikan gratis yang diterapkan oleh Pemerintah, maka semua masyarakat memiliki akses terhadap layanan pendidikan.

Semakin banyaknya masyarakat yang mampu menikmati layanan pendidikan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan masyarakat. Bila hal tersebut meningkat, akan mendorong produktivitas tenaga kerja. Belanja pemerintah yang hakikatnya adalah investasi di bidang *human capital*, merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini juga. Akan tetapi butuh waktu dan proses untuk bisa menikmati hasil dari investasi tersebut.

4.3.3. Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM pada nilai α sebesar 5 persen.. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa, investasi sektor kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah secara nyata dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Karesidenan Besuki. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka

kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Investasi Pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumberdaya manusia yang handal dan sehat akan semakin bertambah. Meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kondisi ekonomi serta kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin pula pada meningkatnya angka harapan hidup berarti pula akan mendorong peningkatan IPM karena hal tersebut merupakan komposit pembentuk IPM.

Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Berdasarkan teori Human Capital menyatakan bahwa meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kondisi ekonomi serta kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin pula pada meningkatnya angka harapan hidup

berarti pula akan mendorong peningkatan IPM karena hal tersebut merupakan komposit pembentuk IPM.

Pengaruh belanja sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya melalui beberapa cara, antara lain misalnya perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan taraf kesehatan mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara b menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

BAB 5. Kesimpulan dan saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai α sebesar 5 persen.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di dibidang Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan dengan nilai α sebesar 5 persen.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan, karena kedua investasi tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang
2. Permerintah perlu melaksanan pengawasan secara intensif terhadap penggunaan dana khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan agar kegiatan tidak banyak mengalami penyimpangan dari sasaran yang sudah direncanakan

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, 2004, *Indonesia Human Develomen Report 2004*, Jakarta
- BPS, 2014, *Konsep Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur*
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya
- Gujarati, N.D, 2015, *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5*, Jakarta, Salemba.
- Haryanto Tri, 2006, *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analisis USAHAWAN, No. 03 Tahun XXXV, Maret 2006*, Jakarta, LMFEUI
- Hastarini, Dwi A, 2005, *Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Dinamika Pembangunan Vol 2 No.1, Semarang, FEB UNDIP*
- Ilyas, dkk, 2014, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai, Makasar, Progam Pasca Sarjana Universitas Hasanudin,*
- Jhingan, M.L, 2000, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada,
- Kuncoro, Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, AMP YKPN,
- Latan, Henghy, *Analisis Multivariate: Teknik dan Aplikasi menggunakan Program IBM SPSS*, Bandung ,Alfabeta,
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto Guritno (2012), *Ekonomi Publik Edisi ke – 3*, Yogyakarta Fakultas Ekonomi UGM
- Mankiw, N.G, 2000, *Makroekonomi*, Edisi Keenam, Jakarta , Erlangga,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XV/MPR/1998, *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Romer, 2001, *Advanced Macroeconomics, 2nd*, (terjemahan), Mcgraw-Hill Book-

Company

Samuelson PA, dan Nordhaus, 2004, *Ilmu Makro Ekonom (Terjemahan)*, Edisi 17, Jakarta, PT Media Global.

Sugiyono, 2008, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung ,CV Alfabeta,

Sukirno sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta ,LPFE UI,

_____, 2008, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada,

Suparno, Heri, 2014, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur*, Ekonomika dan Bisnis Vol 5 No. 1 Tahun 2014

Tarigan, Robinson, 2004, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Jakarta CV Bumi Aksara,

Todaro MP, 2006, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 7, Jakarta , Erlangga

Undang-undang No 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

No. 20 Tahun 2003 *tentang Anggaran Pendidikan*

No. 36 Tahun 2009 *tentang Anggaran Kesehatan*,

Widodo, dkk, 2011, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinn melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah* Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Juli 2011 Vol 1 No. 1, Semarang, FEB UNDIP

LAMPIRAN A

| DAERAH | TAHUN | IPM | GOVP | GOVK | GOVI |
|--------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| JMR | 2006 | 63.04 | 281,630 | 57,344 | 53,160 |
| JMR | 2007 | 63.27 | 395,593 | 132,677 | 141,907 |
| JMR | 2008 | 63.71 | 471,037 | 135,546 | 130,107 |
| JMR | 2009 | 64.33 | 509,813 | 142,683 | 210,604 |
| JMR | 2010 | 64.95 | 552,401 | 167,924 | 111,872 |
| JMR | 2011 | 65.53 | 907,559 | 204,949 | 164,133 |
| JMR | 2012 | 65.99 | 1,050,270 | 227,944 | 228,637 |
| JMR | 2013 | 66.6 | 1,186,384 | 300,304 | 267,000 |
| BWS | 2006 | 60.36 | 156,390 | 45,253 | 25,153 |
| BWS | 2007 | 60.76 | 187,548 | 56,539 | 46,347 |
| BWS | 2008 | 61.26 | 193,388 | 66,560 | 37,315 |
| BWS | 2009 | 62.11 | 272,959 | 75,903 | 80,411 |
| BWS | 2010 | 62.94 | 279,862 | 87,852 | 39,385 |
| BWS | 2011 | 63.81 | 345,957 | 107,532 | 34,875 |
| BWS | 2012 | 64.98 | 443,122 | 116,702 | 107,667 |
| BWS | 2013 | 65.39 | 508,402 | 125,380 | 109,425 |
| STB | 2006 | 61.79 | 148,120 | 32,626 | 49,195 |
| STB | 2007 | 62.64 | 173,042 | 34,567 | 90,872 |
| STB | 2008 | 63.06 | 203,622 | 40,981 | 83,739 |
| STB | 2009 | 63.69 | 258,127 | 54,778 | 70,289 |
| STB | 2010 | 64.26 | 261,942 | 63,484 | 64,521 |
| STB | 2011 | 64.67 | 383,581 | 100,280 | 84,618 |
| STB | 2012 | 65.06 | 440,418 | 111,158 | 88,904 |
| STB | 2013 | 65.73 | 488,790 | 127,817 | 120,085 |
| BWI | 2006 | 66.8 | 336,300 | 68,624 | 76,322 |
| BWI | 2007 | 67.24 | 383,728 | 79,333 | 167,750 |
| BWI | 2008 | 67.8 | 427,886 | 81,243 | 135,987 |
| BWI | 2009 | 68.36 | 225,707 | 84,389 | 203,101 |
| BWI | 2010 | 68.89 | 186,849 | 65,881 | 111,821 |
| BWI | 2011 | 69.58 | 344,766 | 74,293 | 112,165 |
| BWI | 2012 | 70.53 | 816,841 | 154,040 | 177,188 |
| BWI | 2013 | 71.02 | 809,353 | 191,542 | 268,783 |

LAMPIRAN B

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 0.681336 | 2 | 0.7113 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| PENGPEN? | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.6713 |
| PENGGES? | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.7589 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM?

Method: Panel Least Squares

Date: 05/26/16 Time: 18:48

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 32

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 62.31551 | 0.378167 | 164.7831 | 0.0000 |
| PENGPEN? | 3.88E-18 | 2.07E-18 | 1.874097 | 0.0722 |
| PENGGES? | 2.47E-14 | 3.28E-15 | 7.531251 | 0.0000 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.919618 | Mean dependent var | 65.00469 |
| Adjusted R-squared | 0.904160 | S.D. dependent var | 2.743278 |
| S.E. of regression | 0.849265 | Akaike info criterion | 2.678469 |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|----------|
| Sum squared resid | 18.75252 | Schwarz criterion | 2.953295 |
| Log likelihood | -36.85551 | Hannan-Quinn criter. | 2.769566 |
| F-statistic | 59.49118 | Durbin-Watson stat | 0.815124 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |



LAMPIRAN C**HASIL REGRESI BERGANDA PADA DATA PANEL DENGAN MENGGUNAKAN RANDON EFFECT**

Dependent Variable: IPM?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/26/16 Time: 18:47

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C | 62.32331 | 1.889251 | 32.98838 | 0.0000 |
| PENGPEN? | 3.85E-18 | 2.07E-18 | 1.861984 | 0.0728 |
| PENGGES? | 2.46E-14 | 3.27E-15 | 7.528037 | 0.0000 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _JEMBER--C | -1.847603 | | | |
| _BANYUWANGI--C | 3.968084 | | | |
| _SITUBONDO--C | -0.200354 | | | |
| _BONDOWOSO--C | -1.920127 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| | | | S.D. | Rho |
| Cross-section random | | | 3.702332 | 0.9500 |
| Idiosyncratic random | | | 0.849265 | 0.0500 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.701010 | Mean dependent var | | 5.254651 |
| Adjusted R-squared | 0.680390 | S.D. dependent var | | 1.467666 |
| S.E. of regression | 0.829732 | Sum squared resid | | 19.96518 |
| F-statistic | 33.99657 | Durbin-Watson stat | | 0.759840 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

LAMPIRAN D**UJI ASUMSI KLASIK RANDOM EFFECT****1. UJI HETEROKEDASTISITAS PADA RANDOM EFFECT**

Dependent Variable: LOG(RES2)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/26/16 Time: 19:09
 Sample: 2006 2013
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 32

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | -0.991995 | 1.581902 | -0.627090 | 0.5355 |
| PENGPEN | 3.21E-18 | 1.01E-17 | 0.318918 | 0.7521 |
| PENGGES | 7.47E-15 | 1.29E-14 | 0.579884 | 0.5665 |
| R-squared | 0.015301 | Mean dependent var | | -0.148329 |
| Adjusted R-squared | -0.052609 | S.D. dependent var | | 4.277198 |
| S.E. of regression | 4.388265 | Akaike info criterion | | 5.884805 |
| Sum squared resid | 558.4493 | Schwarz criterion | | 6.022218 |
| Log likelihood | -91.15688 | Hannan-Quinn criter. | | 5.930353 |
| F-statistic | 0.225314 | Durbin-Watson stat | | 1.041400 |
| Prob(F-statistic) | 0.799650 | | | |

2. UJI MULTIKOLINEARITAS PADA RANDOM EFFECT

| | PENGPEN | PENGGES |
|---------|----------|----------|
| PENGPEN | 1.000000 | 0.032893 |
| PENGGES | 0.032893 | 1.000000 |

3. UJI NORMALITAS PADA RANDOM EFFECT

